



International e.V.

Annual Narrative Report

January – December 2018

**(Protection of Women Migrant Workers against
TIP and GBV in Lombok Timur)**

(Reported by ADBMI Foundation)



Ringkasan Dokumen

Dokumen ini menjelaskan perkembangan situasi politik, hukum, pelaksanaan program, serta capaian proyek ADBMI dalam upaya memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di Lombok Timur.

1. Perubahan Kebijakan dan Kondisi Eksternal

- Indonesia mengesahkan **UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**, namun implementasinya masih lemah karena aturan turunannya belum lengkap.
- Terbit **Permenaker No. 18 Tahun 2018** yang mengubah sistem jaminan sosial PMI menjadi BPJS, namun masih menyisakan berbagai kelemahan seperti tidak adanya jaminan pensiun, keterbatasan klaim, dan minimnya layanan di luar negeri.
- Pemerintah juga menerapkan sistem **One Channel/Syarikah** untuk penempatan PMI ke Arab Saudi. Kebijakan ini dikritik karena berpotensi menciptakan monopoli perusahaan penempatan serta mengurangi transparansi.

2. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Program

- Gempa besar Lombok tahun 2018 menyebabkan banyak kegiatan proyek tertunda, proses advokasi melambat, dan perhatian pemerintah bergeser pada penanganan bencana.
- Pergantian kepala daerah dan mutasi pejabat membuat ADBMI harus membangun kembali komunikasi dan advokasi dengan pemerintah yang baru.

3. Strategi Program ADBMI

- ADBMI memusatkan pendekatan di tingkat desa melalui pembentukan **LSD (Lembaga Sosial Desa)** sebagai organisasi semi-formal yang diakui melalui regulasi desa dan didorong memperoleh dukungan Dana Desa.
- Model ini dipilih karena advokasi di tingkat desa lebih mudah dilakukan dan lebih berkelanjutan.

4. Perkembangan dan Capaian Program

Beberapa hasil penting yang dicapai:

- LSD mulai diakui oleh pemerintah desa dan kabupaten.
- Menjadi bagian dari jaringan **P2TP2A**.
- Empat desa telah mengesahkan keberadaan LSD melalui keputusan kepala desa.
- Draft Peraturan Desa tentang perlindungan pekerja migran telah selesai disusun.

- Suradadi mulai mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung kegiatan LSD.
- Isu perlindungan pekerja migran berhasil masuk dalam **RPJMD Lombok Timur 2018–2023**, membuka peluang peningkatan anggaran pemerintah.

5. Perubahan Pelaksanaan Program

Selama implementasi:

- Jumlah LSD yang dibentuk meningkat dari target 3 menjadi 5.
- Penyuluhan migrasi aman menjangkau 110 keluarga meskipun tidak dianggarkan.
- Penanganan kasus melebihi target (8 kasus dari target 5).
- Jadwal pelatihan diubah agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
- Terdapat tambahan kegiatan seperti pencetakan buku panduan migrasi aman, workshop Perdes, dan advokasi kepada DPRD.

6. Kemitraan

ADBMI memperkuat kerja sama dengan:

- Media lokal untuk publikasi isu pekerja migran.
- Berbagai NGO di NTB.
- Kelompok masyarakat seperti karang taruna dan kader Posyandu.

7. Pendekatan Lintas Isu

Program mengintegrasikan berbagai perspektif:

- **Keberlanjutan**, melalui penguatan LSD dan dukungan Dana Desa.
- **Pengentasan kemiskinan**, dengan mendorong migrasi aman dan pengelolaan remitansi.
- **Kesetaraan gender**, melalui pendekatan "Laki-Laki Baru" dan layanan bagi perempuan korban.
- **Pemberdayaan pemuda**, sebagai agen perubahan di desa.
- **Kearifan lokal**, menggunakan pertunjukan tradisional Rudat sebagai media edukasi.
- **Kesiapsiagaan bencana**, mengingat wilayah Lombok rawan gempa.

8. Kontribusi terhadap Kebijakan Nasional dan SDGs

Program mendukung:

- Implementasi berbagai regulasi nasional tentang perlindungan pekerja migran.

- RPJMN dan RPJMD terkait peningkatan perlindungan PMI.
- Pencapaian **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya:
 - Pengentasan kemiskinan (SDG 1).
 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8).

9. Kontribusi Pemerintah dan Masyarakat

- Pemerintah daerah, pemerintah desa, LSD, dan masyarakat memberikan dukungan yang tinggi.
- Desa mulai menyediakan sekretariat dan pendanaan bagi LSD.
- Masyarakat berpartisipasi secara sukarela dalam kegiatan, termasuk pertunjukan Rudat dan pendampingan kasus yang bahkan melebihi target proyek.

Kesimpulan

Dokumen menunjukkan bahwa meskipun program menghadapi tantangan besar berupa bencana alam, perubahan politik, dan keterbatasan implementasi kebijakan nasional, **ADBMI berhasil memperkuat sistem perlindungan pekerja migran di tingkat desa** melalui pembentukan dan penguatan LSD, penyusunan Peraturan Desa, perluasan kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat, serta mendorong isu perlindungan pekerja migran menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.